

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan dikemukakan oleh Jansen dan Mackling (1976), yang mengemukakan bahwa teori ini merupakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang, yaitu investor (pemegang saham) selaku principal dengan pihak yang menerima wewenang, yaitu manajer selaku agent dalam bentuk hubungan kerja (Aprilia, 2021) dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan (Rosiana & Mahardhika, 2021).

Tujuan sebuah perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang juga berimbas pada naiknya nilai perusahaan. Tujuan utama teori agensi adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian (Antari et al., 2022). Tetapi pada kenyatannya, banyak manajer yang memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. Seharusnya, manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak baik untuk kepentingan pemegang saham. Namun pada praktiknya, sering terjadi konflik antara pihak-pihak tersebut. Inilah yang kemudian dikenal sebagai teori agensi (Safitri, 2019).

Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual yang didalamnya terdapat principal yang berperan sebagai pemilik perusahaan dan agent yang bertindak untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Ketika agent ditunjuk oleh principal untuk mengelola perusahaan, makasaat itu terdapat pula pendelegasian wewenang dari principal kepada agent dalam hal pengambilan keputusan perusahaan atas nama principal, jika hal seperti ini terjadi maka agent mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan yang bisa disembunyikan dari principal demi

kepentingan agen. Ketidakseimbangan atas informasi seperti ini disebut sebagai asimetri informasi (Pase, 2020). Informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai patokan atau referensi oleh para investor untuk menilai kondisi perusahaan. Informasi yang dikeluarkan seperti laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset, utang, dan laba yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan bisa mengalami kerugian kemungkinan akibat dari kesalahan tindakan agent dalam mengelola perusahaan. Melihat kondisi perusahaan yang terus menerus menghasilkan laba negatif, mengindikasikan atau menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (M. A. Hidayat & Meiranto, 2014) dalam (Pase, 2020).

Informasi yang dipublikasikan perusahaan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Jogiyanto, 2014)

Dalam teori keagenan tindakan manajemen diambil guna untuk melayani kepentingan pemegang saham, terutama ketika kepemilikan sangat tersebar (Donaldson & Davis, 1991). Teori keagenan dapat memakai dimensi asumsi sifat manusia yang terdiri dari 3, seperti:

- a. Sifat manusia. Manusia memiliki sifat yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri (self interest), kemudian juga memiliki batasan pada rasionalitas (bounded rationality), dan juga tidak senang dengan adanya risiko (risk aversion).

- b. Keorganisasian. Mengatakan sebuah organisasi memiliki masalah antara kelompok (organisasi), efisiensi menjadikan criteria produktif, kemudian memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan antar principal dan manajer.
- c. Informasi. Menjelaskan bahwa informasi yang dimiliki dianggap sebagai sebuah barang yang akan dijual belikan (Eisenhardt, 1989) dalam (Pase, 2020).

Sesuai dengan asumsi manusia yang sudah dijelaskan, principal dan manajer dapat menghadapi perselisihan dalam penerapannya, tetapi mereka membutuhkan satu sama lain. Kondisi seperti ini disebut dengan permasalahan keagenan. Penyebab terjadinya masalah tersebut yaitu terjadinya asymmetric information. Asymmetric informasi yaitu suatu laporan (informasi) yang berbeda diakibatkan oleh informasi yang diberikan distribusi antar principal dan yang mengakibatkan timbulnya masalah antara tindakan yang dilakukan principal dan tindakan yang dilakukan agen (Fatimah, 2019). Hal ini dikarenakan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kejadian perusahaan secara keseluruhan sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan atas informasi antara principal dan agen (Endraswati et al., 2014).

Timbul permasalahan antara kedua belah pihak dikarenakan adanya perbedaan kepentingan diantara dua pihak ini. Principal memerlukan pelaporan dari pihak agen untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Maka agen memberi pelaporan untuk pihak principal. Manajemen perlu memaksimalkan nilai perusahaan secara produktif untuk menjaga image perusahaan demi kepentingan beberapa stakeholder (Agustrianti et al., 2020).

2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Secara bahasa, kata kinerja dapat diartikan job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seorang karyawan (Nurharli, 2018). Kinerja sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan, kemauan, usaha

dan perbuatannya sendiri dalam situasi tertentu (Pase, 2020). Kinerja menurut oxford dictionary merupakan suatu tindakan atau suatu cara perusahaan dalam bertindak saat melakukan fungsi organisasinya. Sebenarnya kinerja merupakan suatu kontrak, dimana banyaknya para ahli yang masih memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam mendefinisikan atau mengartikan kata kinerja. Seperti yang dikatakan oleh Robins, bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan (Moehandriono, 2014, p. 96). Beberapa ahli mendefinisikan kinerja sebagai berikut :

1. Menurut Jumingan, kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik hal itu dari segi aspek keuangan, segi aspek pemasaran, segi aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun dari segi aspek sumber daya manusia (Jumingan, 2011, p. 239).
2. Menurut Siswanto, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Amstrong dan Baron, kinerja diartikan sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi (Abdullah, 2014, p. 29).
3. Menurut Wibowo, kinerja merupakan hasil atas sebuah pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan dapat memberikan kontribusi pada ekonomi (Wibowo, 2010, p. 7).
4. Menurut Wirawan, kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh perusahaan melalui fungsi-fungsi atau indikator-indikator satu pekerjaan atau profesi dalam kurun waktu tertentu. Pekerjaan yang dicapai oleh seorang berdasarkan prasyarat- persyaratan pekerjaan (job requirement) (Wirawan, 2012, p. 5).

Banyak sekali definisi atau pengertian dari kinerja oleh para ahli, namun semua pengertian tersebut mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari kata kinerja tersebut. Sehingga dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu hasil/tingkat prestasi atau gambaran keberhasilan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan

kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika secara kaseluruhan selama periode tertentu selama dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja sangatlah penting dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuannya (Afrina, 2019).

Karena kinerja bukan hanya penilaian kepada seseorang, tetapi kinerja juga merupakan penilaian untuk suatu perusahaan. Pada perusahaan kinerja keuangan menjadi alat untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan (Hapsari, 2014) dalam (Pase, 2020). Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Nasution, 2017) dalam (Veronica et al., 2019) serta keterampilan perusahaan saat mengolah keuangannya (Hasti et al., 2022) untuk mengetahui keberhasilan suatu perusahaan perlu diadakan penilaian dan pengukuran kinerja perusahaan dari tiap tahunnya (Sa'diyah, 2020). Serta memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja perusahaan yang telah dilaksanakan (Afifah & Ichsan, 2022).

Sehingga secara sederhana kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran umum dalam hal keuangan yang telah dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dalam bidang keuangan. Kinerja keuangan biasanya menggambarkan tentang bagaimana kinerja dari semua produk dan aktivitas jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam satuan mata uang dan dasar yang digunakan adalah kinerja masa lalu. Berikut beberapa definisi kinerja keuangan oleh para ahli :

1. Menurut Jamaluddin, kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan karena hal tersebut mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Jamaluddin, 2013).

2. Menurut Fahmi, kinerja keuangan perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan tersebut telah melaksanakan atau melakukan kegiatan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012a, p. 2).
3. Fidhayatin menyatakan bahwa kinerja keuangan yang dapat dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu merupakan gambaran sehat atau tidaknya suatu perusahaan (Fidhayatin & Uswati Dewi, 2012).
4. Harmono menyatakan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan umumnya diukur berdasarkan panghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earning per share). Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban tergantung sebagian konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan (Harmono, 2009, p. 46).
5. Menurut Munawir, kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian pegawai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan (Munawir, 2012, p. 30).
6. Menurut Subramanyam dan Wild, kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan dengan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan berguna untuk memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan ini berguna untuk memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang berkaitan dengan periode tersebut (Subramanyam & Wild, 2015, p. 101).
7. Menurut Martono, kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang

nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kadaan inilah yang nantinya akan digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan (Martono et al., 2002, p. 52).

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan diatas, dapat diambil kesimpulan yang sederhana bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator yang tepat untuk digunakan.

Kinerja keuangan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, menilai baik atau buruknya kondisi keuangan, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk periode yang akan mendatang (Afifah & Ichsan, 2022). Selain itu, kinerja keuangan juga berguna untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Purnomo et al., 2018). Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan lainnya (Halim, 2020).

Kinerja keuangan sangatlah berperan penting dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, sehingga apabila kinerja keuangan baik maka operasional perusahaan juga akan berjalan baik tentunya akan maksimal karena kinerja keuangan ini adalah salah satu tolak ukur dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan perusahaan. Dengan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan ini maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik (Sanjaya & Rizky, 2018). Serta sebagai prestasi manajemen dalam meraih tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Patricia et al., 2018). Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah dan pihak manajemen sendiri (Rahman, 2020). Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan

yang telah ditetapkan (Halim, 2020). Pada hakekatnya kinerja keuangan mempunyai banyak tujuan, seperti di ungkapkan oleh Munawir 2014 yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perusahaan saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dilikuidasikan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profibilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, adalah melakukan usahanya dengan stabil, yang di ukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atau hutang- hutangnya dengan tepat waktu, serta kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. (A. R. Hidayat, 2021).

Dari beberapa tujuan kinerja keuangan tersebut, fungsi pengukuran kinerja keuangan cukup juga vital dalam sebuah keputusan perusahaan. Ada beberapa fungsi dari pengukuran kinerja keuangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi keuangan Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihatmelihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Penggunaan keuangan yang jelas. Termasuk diantaranya apabila terjadi kecurangan dalam laporan keuangan, atau penggunaan keuangan yang tidak efisien.
2. Efektifitas manajemen operasional Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya, dan efektifitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. dengan kata lain melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional.
3. Optimalisasi penggunaan aktiva Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Besaran aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, menjadikan bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan.

4. Tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan Kesehatan keuangan perusahaan berarti selalu mendapatkan laba dari setiap aktivitas bisnis perusahaan. Sehingga dapat dianalisa seberapa lama perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang.
5. Untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang Pengembangan bisnis seringkali dilakukan oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan. Pengembangan bisnis yang dilakukan perusahaan memerlukan analisa keuangan yang lebih seksama, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu cara dalam menilai kinerja keuangan adalah dengan hasil dari kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan periode pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis (Shihab & Al-Misbah, n.d., p. 238) dalam (Pase, 2020), serta menggunakan analisis rasio keuangan yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas (Febriani, 2020), yang dihitung berdasarkan perbandingan data keuangan perusahaan yang terdapat pada laporan keuangannya (Afifah & Ichsan, 2022) dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan (Casnila & A. Nurfitriana, 2020).

Rasio keuangan penting untuk dilakukan dalam analisa laporan keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan entitas (Agustrianti et al., 2020) yang digunakan untuk membandingkan seberapa besar tingkat kinerja keuangan perusahaan, serta menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan (Halim, 2020). Pada dasarnya perhitungan rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Harahap, 2015, p. 297). Terdapat manfaat analisis rasio keuangan menurut (Fahmi, 2012b, p. 109) dalam (A. R. Hidayat, 2021) dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis rasio keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk pembuatan perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi.

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka- angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya yang dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan atau antar laporan keuangan (Kasmir, 2015, p. 231). Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu (Destiani & Hendriyani, 2022), diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas (Solikhah et al., 2018). Ketiga rasio tersebut merupakan rasio keuangan yang utama digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang- utang (liabilitas) jangka pendeknya atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajiban saat ditagih (Kasmir, 2016, p. 128). Rasio likuiditas merupakan rasio yang umumnya menjadi pertimbangan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan (Anggraini, 2018). Analisa rasio likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2016, p. 134).

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

b. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory) (Kasmir, 2016, p. 136).

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang (Munawir, 2015, p. 238). Rasio solvabilitas dapat diukur dengan rasio sebagai berikut:

a. Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio)

merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

$$\text{Hutang Terhadap Aktiva} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas (Kasmir, 2016, p. 157).

$$\text{Hutang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2016, p. 196). Analisis rasio profitabilitas ini dapat ditentukan dengan cara berikut:

a. Pengembalian atas Aset (Return on Assets)

ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Kasmir, 2016, p. 201).

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100$$

b. Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity)

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (Harahap, 2015, p. 305).

$$ROE = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Ekuitas} \times 100$$

c. Margin Laba (Net Profit Margin)

NPM mengukur berapa besar presentase dari penjualan sebelum bunga pajak (Gitman et al., 2012, pp. 79–82). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{Laba\ Bersih}{Penjualan} \times 100$$

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas berupa *return on asset (ROA)*, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset (Anandamaya & Hermanto, 2021). ROA adalah kemampuan aktivitas rata-rata dalam menghasilkan laba sebelum pajak (*earning before tax*). Return on Aset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya (Yuliani, 2021). Semakin tinggi nilai ROA ini maka semakin baik keadaan perusahaan (Winarno, 2019).

2.2 Pengertian PSAK 72

IAI telah mengesahkan PSAK 72 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terhitung pada tanggal 26 Juli 2017 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Namun, bagi perusahaan yang pelaporannya berdasarkan IFRS diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan mengenai pendapatan selama periode

pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 (Amyulianthy et al., 2022). PSAK 72 merupakan standar utama yang menjadi pedoman peraturan terkait pengakuan pendapatan yang akan menjadi pengganti dari seluruh standar yang mengatur pengakuan pendapatan sebelumnya (A. R. Hidayat, 2021). PSAK 72 mengubah standar sebelumnya yaitu PSAK34 (kontrak konstruksi), PSAK 23 (pendapatan) dan IAS 18, ISAK 10 (program loyalitas pelanggan), ISAK21 (perjanjian konstruksi real estate), ISAK 27 (pengalihan aset dari pelanggan), PSAK44 (akuntansi aktivitas pengembangan real estate), BAS 7 (perlakuan akuntansi dan keterbukaan dalam transaksi hubungan keagenan) (Agustrianti et al., 2020).

Berbeda PSAK sebelumnya yaitu PSAK 23, PSAK 72 mempunyai tujuan untuk menetapkan prinsip di mana perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna mengenai pendapatan dan arus kas dalam hal sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastiannya. Dalam PSAK 72, pendapatan didefinisikan sebagai penghasilan yang berasal dari aktivitas normal suatu perusahaan (Febriani, 2020). Berdasarkan IASB perubahan standar ini akan berdampak terhadap perusahaan yang bentuk transaksinya dalam bentuk kontrak jangka panjang (Anggraini, 2018).

Dampak dari penerapan PSAK 72 ini cukup signifikan dalam sektor perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan dikarenakan sektor tersebut memiliki kontrak dengan pelanggan dan merubah pola pengakuan pendapatan sehingga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Sektor lain yang terkena efek dari perubahan standar ini adalah sektor industri konstruksi, telekomunikasi, retail, dan manufaktur (IAI, 2021). PSAK72 menggantikan sistem pendapatan kontrak berawal dari (rule based) menjadi (principle based) (Agustrianti et al., 2020). PSAK 72 juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengungkapan mengenai pendapatan, menyediakan panduan yang sebelumnya belum diatur dan meningkatkan panduan untuk pengakuan pendapatan dari produk gabungan (contoh barang dan jasa) (Wisnantiasri, 2018). Prinsip yang digunakan pada PSAK 72 adalah pengalihan pengendalian (transfer of control). Saat penjual telah mengalihkan pengendalian suatu kewajiban pelaksanaan ke pembeli maka penjual

sudah dapat mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan tersebut (Herliana et al., 2018). Pendapatan yang diakui bisa dilakukan secara bertahap sesuai umur kontrak yang sudah disepakati (A. R. Hidayat, 2021). Untuk pengakuan pendapatan yang dilakukan bertahap harus memenuhi persyaratan tertentu diantaranya adanya peningkatan aset yang diterima oleh pelanggan dan pemenuhan kewajiban yang sudah dilakukan oleh suatu entitas atas suatu kontrak tertentu. Jika belum memenuhi syarat tertentu maka pendapatan baru bisa diakui setelah adanya penyerahan aset (Casnila & A. Nurfitriana, 2020).

Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, sehingga diperlukan suatu pengakuan pendapatan. Pendapatan (revenue) dalam PSAK 72 diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas. Metode pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 adalah accrual basis, di mana pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi. Pendapatan perlu diakui dalam waktu yang tepat agar mencerminkan nilai perusahaan sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian informasi keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kriteria tertentu perlu dipenuhi dalam menentukan pengakuan pendapatan agar menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya (Shabirah HS, 2020).

PSAK 72 mempunyai tujuan untuk menetapkan prinsip dimana perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan mengenai arus kas dalam sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastiaan pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dalam PSAK 72, pendapatan diakui oleh perusahaan ketika perusahaan telah melaksanakan kewajiban dengan mengalihka barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan (aset). Pelanggan akan mendapatkan pengendalian atas aset ketika aset telah dialihkan. Dengan kata lain pendapatan baru akan diakui saat transaksi telah terjadi (Auliyek, 2020).

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisa transaksi yang ada berdasarkan kontrak terlebih dahulu, model pengakuan pendapatan yang diterapkan PSAK 72 dikenal dengan sebutan lima tahapan model (five-step model) sebelum mengakui suatu pendapatan, yaitu:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.

Untuk mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, suatu kontrak bisa tertulis atau lisan. Kontrak itu ada bila bisa dipaksakan, para pihak telah menyetujui dan berkomitmen melaksanakan kewajiban, hak setiap pihak atas barang atau jasa yang akan dialihkan dan imbalan dapat diidentifikasi, memiliki substansi komersial, dan kemungkinan besar entitas bisa menagih imbalan (A. R. Hidayat, 2021).

2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak.

Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik. Dimana suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan (distinct). Atau serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (A. R. Hidayat, 2021).

3. Menentukan harga transaksi.

Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama (atau pihak berelasi dari pelanggan) dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Kontrak yang dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal; jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain; atau barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak (atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak) sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal (Casnila & A. Nurfitriana, 2020).

4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
Modifikasi kontrak, entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat kedua kondisi pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan (*distinct*) dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri (*stand-alone selling prices*) entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu (Veronica et al., 2019).
5. Mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
Bila kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi persyaratan di atas, dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan sebagai pendapatan jika; entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk dan seluruh imbalan telah diterima entitas dan tidak dapat dikembalikan atau Kontrak telah berakhir dan imbalan yang diterima entitas tidak dapat dikembalikan (A. R. Hidayat, 2021).

Pendapatan dapat diakui jika entitas telah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dan entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan, oleh karena itu, memenuhi kewajiban dan mengakui pendapatan sepanjang waktu dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Hak atas pembayaran ini tidak harus dalam jumlah tetap. Akan tetapi, sepanjang durasi waktu kontrak, entitas berhak atas jumlah yang setidaknya mengompensasi entitas atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

Pada saat tertentu seperti tahap awal kontrak, entitas mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu dimana entitas dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar tanpa harus menunda pengakuan pendapatan sampai periode kontrak berakhir (Londa et al., 2020). Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi berkualitas tinggi yang berguna terkait sifat,

waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas untuk pengguna laporan keuangan (IASB, 2018). Pada paragraf kedua, PSAK 72 menyebutkan bahwa pendapatan diakui untuk menggambarkan pengalihan aset berupa barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Pada PSAK 72, pendapatan diakui saat transaksi dalam proses pertukaran aset berupa barang atau jasa telah selesai dilaksanakan. PSAK 72 juga mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan (paragraf 10). Dalam sebuah perjanjian tentu memerlukan bukti dalam setiap transaksinya, bukti tersebut dapat berupa tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum perusahaan (Febriani, 2020).

Dengan adanya PSAK 72 ini, membuat perusahaan menjadi terlihat tidak lebih baik dari segi laporan keuangan. Walaupun dalam kenyataannya, kemunculan PSAK 72 ini dapat membuat perusahaan menjadi semakin sehat. Perusahaan yang sebelumnya mencatat pendapatan melalui kontrak penjualan meskipun unitnya masih dalam tahap pembangunan, setelah menerapkan PSAK 72, transaksi tersebut tidak dapat dicatat sebagai pendapatan (Londa et al., 2020). Tetapi terdapat sisi positifnya yaitu dengan diberlakukannya sistem pencatatan pendapatan menurut PSAK 72, investor akan lebih tertarik karena kondisi perusahaan menjadi lebih transparansi (Febriani, 2020).

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
1.	Veronica at al (Veronica, Utami Puji Lestari,	Analisis Dampak Penerapan Pengakuan	Penerapan PSAK 72	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengakuan

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
	Elisabeth Yansye Metekohy, 2019)	Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018		pendapatan berdasarkan PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jika dibanding dengan menggunakan standar sebelumnya.
2.	Amyulianthy at al (Rafrini Amyulianthy, Theresya Indah Rahmat, Mira Munira, 2022)	Analisis Dampak Implementasi PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Penerapan PSAK 72	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dan PSAK 72 menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
				sehingga memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan investor maupun perusahaan
3.	Wiliana Agustrianti et al (2020) (Agustrianti, Saputri Mashuri, & Nopiyanti, 2020)	Dampak penerapan psak 72 terhadap kinerja Keuangan perusahaan property, real estate and Building construction yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018- 2019	Penerapan PSAK 72	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4.	Duwi rahayu et al (2020)	Dampak Implementasi Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan Di Era Pandemi Covid-19	Penerapan PSAK 72	Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: PSAK 72 memiliki pengaruh signifikan (negatif) terhadap

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
				rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio pasar dan rasio profitabilitas. Sebaliknya implementasi PSAK 72 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas.
5.	Claristy Novenaliane Halim, 2020	Pengaruh Implementasi Pengakuan Pendapatan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate Tahun 2018- 2019)	Penerapan PSAK 72	a. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang tercermin oleh rasio likuiditas menunjukkan pengaruh negatif. b. Hasil berbeda dengan rasio kinerja keuangan lainnya bahwa rasio aktivitas, rasio solvabilitas,

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
				<p>rasio profitabilitas dan rasio pasar tidak berpengaruh secara signifikan.</p> <p>c. Hasil rasio aktivitas menunjukkan perusahaan real estate mengalami sedikit penurunan dalam mengefisiensikan aset-asetnya diakibatkan masih banyak kontrak jangka panjang yang</p>
6.	Ayu Rifatul Hidayat, 2021	Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan	Pandemi Penerapan PSAK 72	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 72 berpengaruh positif dan

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
		Perusahaan Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19		signifikan terhadap kinerja keuangan.
7.	Dias Paramitha Febriani (2020)	Dampak Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estate	PSAK 72, Pengakuan Pendapatan, Kinerja Keuangan	Hasil menunjukkan hasil pendapatan bersih yang dihitung berdasarkan PSAK 72 lebih kecil. Serta hasil kinerja keuangan pada ketiga perusahaan memperlihatkan kondisi yang kurang baik jika menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72.
8.	Sila Ninin Wisnantiasri (2018)	Pengaruh PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Terhadap	PSAK 72, shareholder s value dan estimasi risiko dengan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa terbukti secara empiris meningkatkan shareholder value

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Peristiwa	Hasil
		Shareholder Value (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction)	metode penelitian kuantitatif	yang ditunjukkan koefisien CAR yang positif dan signifikan

2.6 Kerangka Pemikiran

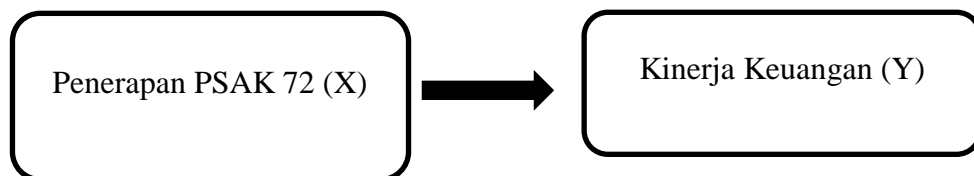
Kinerja keuangan merupakan gambaran kinerja perusahaan pada periode tertentu didasarkan pada rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio likuiditas berupa current ratio, rasio solvabilitas berupa debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas berupa net profit margin. Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan yaitu menggunakan rasio profitabilitas berupa ROA. Adanya penerapan standar baru di Indonesia mengakibatkan dampak pada beberapa sektor termasuk sektor manufaktur. Standar baru yang akan diterapkan tersebut salah satunya adalah PSAK 72 yang mengatur tentang pendapatan kontrak dari pelanggan. Perbedaan standar tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada kinerja keuangan suatu entitas. Hal ini dikarenakan pendapatan yang dilaporkan di laporan laba rugi nantinya akan berhubungan dengan laporan keuangan lainnya seperti laporan laba ditahan laporan posisi keuangan, laporan arus kas hingga pengungkapan yang ada di catatan atas laporan keuangan.

Penerapan PSAK 72 sangat berdampak bagi para pelaku usaha, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Tentu saja dampak yang sangat dikhawatirkan adalah laporan keuangan 2020, hal itu diakibatkan oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19. Perlambatan ekonomi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan manufaktur yakni pada saat pengakuan pendapatan kontrak dari pelanggan harus melakukan penyusunan strategi dengan mengelompokkan

penjualan yang mana yang dapat diakui dan dicatat dengan cepat, kemudian tantangan selanjutnya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut diakibatkan masyarakat yang cenderung menyimpan uangnya untuk keperluan bahan makanan untuk menghadapi pandemi covid-19.

Pendapatan diakui untuk dapat menggambarkan penyerahan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan yang merefleksikan pembayaran yang diharapkan akan diperoleh oleh entitas atas barang atau jasa tersebut. Setiap menentukan pendekatan pengakuan pendapatan pada PSAK 72, entitas harus melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari lima tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
3. Menentukan harga transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak
5. Mengakui pendapatan ketika entitas sudah (atau sedang) menyelesaikan kewajiban pelaksanaan



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.7 Bangunan Hipotesis

Setiap perusahaan publik wajib menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan bagi pihak eksternal seperti investor dalam menanamkan modalnya, kreditor dalam memberi pinjaman kepada perusahaan, supplier dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kontrak jasa ataupun barang, dan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pajak dan pungutan yang akan dikenakan pada perusahaan. Laporan perusahaan diukur melalui kinerja keuangan perusahaan dalam upaya mengukur keberhasilan perusahaan. Tidak hanya itu suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) termasuk standar yang wajib diterapkan bagi perusahaan-perusahaan publik seperti kebijakan PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip pada perusahaan untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Ketidakpastian tersebut diatasi dengan adanya kontrak antara pelanggan dengan perusahaan, agar pengakuan pendapatan dapat diakui secara satu waktu tertentu atau waktu ke waktu. Jika manajemen perusahaan keliru dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan, maka menyebabkan pendapatan dan laba menjadi overstatement atau understatement dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini didukung dengan teori keagenan, bahwa jika manajemen mengindikasikan kinerja keuangan yang buruk, maka tingkat kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan akan ikut menurun. Namun sebaliknya, jika hasil kinerja keuangan terindikasi baik, maka dapat meningkatkan tingkat kepercayaan bagi pengguna laporan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya oleh Anggraini (2018) bahwa pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 23 serta PSAK 72 memiliki dampak pada perubahan pengakuan pendapatan dan kinerja keuangan. Pada kondisi tertentu pada transaksi menyebabkan adanya perbedaan permanen atau sementara sehingga pendapatan yang diakui dan dicatat berdasarkan kedua PSAK berbeda. Maka pendapatan diakui dan dicatat lebih kecil jika sesuai PSAK 72 dibandingkan dengan PSAK 23. Kinerja keuangan berdasarkan tiga rasio keuangan utama menunjukkan angka yang lebih baik sesuai PSAK 23 namun lebih rata (smooth) berdasarkan PSAK 72.

Selain itu penelitian sebelumnya oleh Veronica, Lestari & Metekohy (2019) bahwa pendapatan di tahun 2019 menjadi lebih kecil jika menggunakan PSAK 72 dikarenakan standar baru ini pendapatan dari kontrak jangka panjang tidak dapat diakui pada tahun 2018 berbeda dengan standar sebelumnya yaitu PSAK 44 yang

memiliki pendapatan yang tinggi. Selain itu kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik jika menerapkan PSAK 72 dikarenakan lebih memperlihatkan keadaan perusahaan dalam hal pendapatan yang diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan dengan perpindahan kendali atas aset perusahaan real este. Dengan adanya standar baru yang mengatur tentang pendapatan tersebut, maka hal ini akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan suatu perusahaan setelah diterapkannya PSAK 72. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah adanya penerapan PSAK 72 maka menimbulkan pengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur.

H1 : Penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.